

PENERAPAN INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

Citra Reskia

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bagian Hukum Internasional

Abstrak

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan bagian dari instrument internasional Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak terhadap dampak dari konflik bersenjata. Hak mereka atas kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan merupakan hak anak yang harus tetap ditegakkan dalam situasi konflik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak dalam situasi konflik yaitu: membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen atau penggunaan tentara anak-anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan bagi anak-anak. Oleh karena itu perlindungan di titikberatkan pada perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi anak yang terlibat sebagai kombatan dan anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan instrument HAM internasional telah memberikan dasar untuk bertindak dalam perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata. Jelas, apa yang kurang adalah mekanisme dan kemauan untuk penegakan. Sehingga dalam hal ini perlunya *good will* dari pemerintah serta sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar.

Kata Kunci: Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata.

Pendahuluan

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.

Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum Internasional maupun nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*¹, dan untuk

¹ UDHR adalah deklarasi yang terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah

menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*)² yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Realitas keadaan anak di dunia ini masihlah belum menggembirakan. Kepedulian terhadap persoalan anak terutama mulai berlangsung pada tahun 1920-an, se usai Perang Dunia I. Pihak yang banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Para aktivis tampil ke publik mendesak sejumlah pihak agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perang. Salah satu di antara para aktivis itu bernama Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi *Save the Children Fund International Union*.³

Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan juta anak hidup menderita, bahkan tewas akibat perang yang berkecamuk di berbagai Negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Palestina, Guatemala, Liberia, Srilanka, Mozambik, Angola, Afganistan, Rwanda, Libya, Suriah, Somalia atau Sudan, Kamboja, Haiti ataupun Bosnia. Akibat perang yang tak kunjung usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun kian meningkat, khususnya anak-anak.

Anak terus saja menjadi korban utama konflik bersenjata. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya. Anak dibunuh, kehilangan orangtua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, menderita trauma batin dan emosi yang mendalam. Mereka mengungsi dan sangatlah rentan khususnya terhadap kekerasan, pengerasan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi, dan kematian. Anak dikerahkan dan digunakan sebagai tentara anak-anak dalam skala yang sangat besar. Status gadis anak perempuan memberikan resiko tambahan, khususnya terhadap kekerasan seksual. Padahal para pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi hak anak-anak tersebut.

Realitas yang dihadapi anak-anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa masalah anak belumlah mereda. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan potensi-potensi negara seluruh bangsa di dunia. Untuk itu dalam konteks menjamin dan melindungi hak-hak anak, realisasinya diwujudkan dalam kebijakan (*policy*),

ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi tersebut diterima oleh 49 negara, tidak ada yang menentang, 9 abstain dan berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

² Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), untuk seterusnya akan disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi.

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 28.

hukum (*law*), sedangkan dalam konteks pemenuhan hak anak, realisasinya dilakukan dengan tindakan konkrit yang dapat mewujudkan perlindungan anak yang diharapkan.

Pengertian Anak

Menurut Supriyadi W. Eddyono, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demikepentingannya.⁴

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.⁵

Dalam pengertian hukum Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsure internal tersebut adalah:⁶

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Unsur eksternal dalam diri anak ialah:⁷

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁸

⁴ Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989.

⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hal.6.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) hal. 33.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁹

Arif Gosita memberikan definisi tentang perlindungan anak/remaja yaitu: suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan, pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.¹¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan¹²

Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail dan merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.¹³

Pengertian Konflik Bersenjata

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hal.3.

¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 25-26.

¹² Maidin Gultom, *Op Cit* hal. 34.

¹³ Rika Saraswati, *Op Cit*, hal.22.

perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.

Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, yaitu:¹⁴

- 1) Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata di satu wilayah.
- 2) Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.

Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang yaitu:¹⁵

- 1) Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*);
- 2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*);
- 3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*);
- 4) Perang yang menggunakan teknologi modern (*by using modern technology*).

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Menurut seorang ahli Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah *more justified and logical*.¹⁶

Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik bersenjata antara lain:¹⁷

Menurut Pictet:

"The term armed conflict has been used here in addition to the word "war" which it is tending to supplant"

Menurut Edward Kossoy:

"The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflicts seem more justified and logical"

¹⁴ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta : 1997), hal. 2-4.

¹⁵ Quincy Wright, *A study of War*, (The University Chicago Press, Chicago, 1951), dikutip dari *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, ed. Fadillah Agus, (Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta : 1997), hal. 1 – 3.

¹⁶ GPH Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 15.

¹⁷ Suardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmiah Santika, Vol. 2 No. 3 Juli 2005, hal. 291.

Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan definisi resmi dari “*armed conflict*” oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *armed conflict*.¹⁸

Haryomataram membedakan antara sengketa bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan sengketa bersenjata non-internasional (*non international armed conflict*), dan secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.¹⁹

Selanjutnya sengketa bersenjata Internasional dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui salah satu dari mereka.²⁰

“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”.²¹

Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional. Dalam hal ini, dimana *peoples* (suku bangsa) sedang bertempur melawan dominasi colonial dan pendudukan asing dan melawan system pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.²² Sengketa ini biasa disebut dengan istilah *War of National Liberation* atau yang dikenal dengan istilah *CAR conflict (conflict Against Racist Regime)* ini adalah *fighting against Colonial domination; Alien occupation; and against Racist Regime*, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 4 Protokol I tahun 1977.

Untuk istilah *Non-international Armed Conflict* dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan criteria atau definisi sengketa bersenjata non-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 56.

²¹ Pasal 2 (1) Konvensi Jenewa 1949.

²² Rina Rusman, *Op Cit*, hal. 58.

internasional. Kriteria tentang konflik bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II 1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Noninternasional.²³

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat kita jumpai dalam berbagai instrumen HAM dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Adapun beberapa prinsip hak asasi manusia yaitu:²⁴

a. Bersifat universal dan tak dapat dicabut (*universality and inalienability*).

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: “*Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.*”

b. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*).

Kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip *indivisibility* ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993.

c. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*interdependence and interrelatedness*).

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

d. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality and non-discrimination*).

Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan,

²³ *Ibid*, hal. 60.

²⁴ KOMNAS HAM, *Prinsip-prinsip Pokok Hak Asasi Manusia*, www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/848-prinsip-prinsip-pokok-hak-asasi-manusia (diakses 22 Desember 2012, pukul 22.14 wita).

tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

e. Turut berpartisipasi dan berperan aktif (*participation and inclusion*).

Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

f. Ada pertanggungjawaban dan penegakkan hukum (*accountability and rule of law*).

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak.

Latar Belakang dan Sejarah Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), untuk seterusnya akan disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjanjian internasional yang termasuk salah satu instrumen HAM internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (*International Custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional).²⁵

Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. KHA merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (*political and civil rights*), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Kehadirannya mengesampingkan dikotomisasi antara hak sipil dan politik sebagai generasi pertama HAM dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal generasi kedua HAM.²⁶

²⁵ Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, (Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara, 2002) hal. 1.

²⁶ Muhammad Joni, *Op Cit*, hal. 2.

Di dalamnya diatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.²⁷

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat daribencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.²⁸

Pandangan ini dipengaruhi oleh laporan tentang ketidakadilan yang serius yang diderita oleh anak-anak: tingginya tingkat kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Ditemukan pula berbagai kasus yang mencemaskan mengenai anak-anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, mengenai anak-anak dalam penjara atau dalam keadaan yang lain, serta mengenai anak-anak sebagai pengungsi dan korban konflik bersenjata.²⁹

Melirik sejarah perkembangannya, masyarakat dunia sekarang ini nampaknya harus berhutang kepada Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund* (sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang bekerja untuk perlindungan anak). Beliau, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, merawat para pengungsi anak di Balkan, akibat Perang Dunia I, membuat sebuah rancangan “Piagam Anak” pada tahun 1923. Dalam ringkasan tersebut, Jebb mengembangkan 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak.³⁰

Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB

²⁷ Edy Ikhsan, *Loc Cit.*

²⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi : Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal.1.

²⁹ Anonim, *Hak Anak*, Lembar Fakta No. 10 (Revisi 1), Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Anak, hal. 3.

³⁰ UNICEF, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996, hal.8. Lihat juga M.Joni, SH dan Zulchaina Z.Tanamas, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999, hal.30) dikutip dalam Edy Ikhsan, *Loc Cit.*, hal. 1-2.

kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.³¹ Deklarasi Umum tersebut menyatakan:

*“Semua manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam keluhuran dan hak dan juga menekankan bahwa Ibu dan Anak berhak atas perlakuan perlindungan khusus serta harus merujuk kepada keluarga sebagai kelompok yang fundamental dalam masyarakat”*³²

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Kemudian pada tahun 1979 negara Polandia mengajukan sebuah rancangan teks Konvensi Hak-hak Anak yang mengikat secara yuridis pada sebuah acara memperingati tahun anak, yang disponsori oleh PBB.³³

Pada tanggal 20 November 1989, akhirnya, Konvensi Hak Anak, dengan 54 buah pasal yang kita kenal sekarang, diadopsi oleh PBB dan dinyatakan berlaku sejak September 1990. Sejak saat itu, KHA mempunyai ikatan hukum yang kuat bagi tiap negara yang meratifikasinya. Pada 31 Desember 1995, tidak kurang dari 185 Negara telah meratifikasi Konvensi ini. Jumlah seperti ini belum pernah tercapai sebelumnya di bidang hak asasi manusia. Konvensi juga untuk pertama kalinya membentuk suatu badan internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni Komite Hak-hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*).³⁴

Penting untuk diingat bahwa CRC membentuk sebuah komite mengenai hak anak tersebut, yang dimandatkan untuk memonitor kemajuan yang dibuat Negara pihak terhadap kewajiban mereka menurut konvensi dan protokol opsionalnya.³⁵

Substansi Materi Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi ini merupakan instrument Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat

³¹ Supriyadi W. Eddyono, *Loc Cit.*

³² <http://www.unicef.org/crc/crc.htm> (diakses 12 November 2012 Pukul 15:00).

³³ Supriyadi, *Loc Cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Erica Harper, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), hal. 204.

ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Mengkualifikasikan materi KHA bukan saja menegaskan apa yang merupakan hak-hak anak, namun juga bagaimana tanggungjawab negara menjalankan kewajibannya. Materi yang terkandung dalam KHA dapat dikualifikasi kepada:³⁶

1. Penegasan hak-hak anak,
2. Perlindungan anak oleh negara,
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orangtua, dan swasta) dalam menjamin, menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak.

Disamping itu, berdasarkan strukturnya, isi Konvensi ini terdiri atas empat bagian yaitu:

1) Mukadimah/Preamble

Didalam preambule atau mukadimah KHA di kemukakan bagaimana latar belakang dan landasan filosofis hak-hak anak.³⁷

2) Bagian I

Terdiri dari 41 pasal (pasal 1-41) yang berisi ketentuan-ketentuan substantif menyangkut hak-hak anak.

3) Bagian II

Terdiri atas empat pasal (pasal 42-45) yang berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut mekanisme monitoring dan implementasi.

4) Bagian III

Terdiri atas Sembilan pasal terakhir (pasal 46-54) yang berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberlakuan konvensi ini.

Ada empat Prinsip yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak, yakni :³⁸

1) Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.

³⁶ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal.6.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Op Cit*, hal.2-3.

2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya, Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:³⁹

1. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapattkam pendidikan, dn untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fiski, mental, spritual, moral dan sosial anak;
3. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Perlindungan terhadap Hak Anak berdasarkan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Situasi Konflik Bersenjata.

Dalam situasi amanpun anak membutuhkan perlindungan dalam artian yang luas demikian juga halnya anak yang berada dalam situasi konflik apalagi bila dihubungkan

³⁹ Edy Ikhsan, *Op Cit*, hal.3.

dengan situasi konflik bersenjata dimana dalam hal ini mereka masuk dalam katagori anak yang membutuhkan perlindungan khusus.⁴⁰

Secara normatif negara tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk melindungi dan membantu anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata. Kewajiban ini merupakan prinsip dasar dari hak asasi manusia (HAM) dan hukum perang (humanitarian law).

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal HAM dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum yang kemudian ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atas konvensi ini secara keseluruhan, dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan dalam lingkup nasional. Prinsip-prinsip sangat penting untuk memahami bagaimana untuk sepenuhnya melaksanakan konvensi tersebut.

- **Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2)**

Dalam Pasal 2 KHA bahwa semua hak berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali dan dalam situasi apapun. Ini adalah kewajiban negara untuk melindungi anak dari diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari sianak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah dan untuk mengambil tindakan positif untuk menjamin hak-hak mereka.⁴¹

Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.⁴² Prinsip ini juga merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.

⁴⁰ <http://magdalenasitorus.blogspot.com/2008/09/anak-dalam-situasi-konflik-bersenjata.html>. (diakses 22 Oktober 2012, pukul 00.10 wita).

⁴¹ *Children Right's in Walles: UNCRC dalam* <http://www.childrensrightswales.org.uk/uncrc-principles.aspx>, (diakses 9 januari 2013, pukul 21:15).

⁴² Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 3.

- **Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (Pasal 3)**

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.⁴³

Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peran orang dewasa justru menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan lagi oleh anak di dalam situasi konflik.

- **Prinsip atas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6)**

Walaupun dalam keadaan konflik bersenjataupun, setiap anak tetap harus tetap dijamin hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang disebutkan oleh KHA yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu.

Hak tumbuh dan berkembang anak dalam hal ini meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standart of living*).

- **Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Pasal 12)**

Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁴⁴ Prinsip ini juga merupakan pencerminan dari prinsip *indivisibility* HAM.

⁴³ Rika Saraswati, *Op Cit*, hal. 25.

⁴⁴ Muhammad Joni, *Op Cit*, hal. 5.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Hak Anak 1989

Pada Perang Dunia II, korban sipil terdiri 50% dari mereka yang mati, sebagian besar dari serangan bom. Namun, pada tahun 1996, dalam laporannya tentang Dampak Konflik Bersenjata pada Anak, Graça Machel⁴⁵ memperkirakan bahwa warga sipil terdiri 90% korban perang dan proporsi terbesar dari para korban adalah perempuan dan anak. Abad sebelumnya angka ini telah hanya 5%.⁴⁶

Terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak selama konflik bersenjata yang disebutkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya, menjadi dasar Dewan dalam melindungi anak-anak selama perang. Hal tersebut dipilih karena kemampuan mereka untuk dipantau dan diukur, sifat mengerikan mereka dan keparahan konsekuensi mereka pada kehidupan anak-anak. Enam pelanggaran berat tersebut adalah membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen atau penggunaan tentara anak-anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan bagi anak-anak.⁴⁷

Salah satu tugas yang paling mendesak ketika konflik mengancam adalah untuk menemukan cara untuk melindungi anak-anak. Perlindungan dalam pengertian ini berarti tidak hanya membela mereka melawan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan mereka dihormati dan dipenuhi.

Dalam hal ini Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989, adalah suatu bingkai hukum yang terpenting sebagai perlindungan terhadap hak anak terutama dalam konflik bersenjata. Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberi materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Dengan demikian kaidah-kaidah yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan mengenai hak anak dan juga perlindungannya.⁴⁸

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. Secara

⁴⁵ **Graca Machel** terkenal di dunia atas komitmennya terhadap hak-hak anak dan perempuan, pendidikan, dan pembangunan. Dia menjabat sebagai Presiden Komisi Nasional UNESCO di Mozambik, sebagai delegasi ke Konferensi UNICEF tahun 1988. Pada tahun 1994 Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali menunjuk Graca ahli independen yang bertugas memproduksi **Laporan PBB tentang Dampak Konflik Bersenjata pada Anak (*The Impact of Armed Conflict on Children* 1996, Graça Machel. A/51/306.Add.1)** dan Graca menghabiskan 1994-1996 bepergian untuk menyelidiki penderitaan anak-anak di negara dilanda perang. (<http://www.unicef.org/graca>, diakses 25 Januari 2013, pukul 11.15 wita).

⁴⁶ Rachel Harvey, *Children and Armed Conflict: A Guide to International Humanitarian and Human Right Law*, (IBCR: Montreal, Canada, 2003), hal. 5.

⁴⁷ *Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, the Six Grave Violation Against Children During Armed Conflict: the legal foundation, working paper N.1, UNICEF, Oktober 2009*, hal. 2-3.

⁴⁸ Muhammad Joni, *Op Cit*, hal. 72.

garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut : *pertama*, penegakan hak-hak anak. *kedua*, perlindungan anak oleh negara. *Ketiga*, peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap hak asasi anak dalam situasi konflik bersenjata (*children in situation of armed conflict*) diartikan sebagai perlindungan anak sebagai korban konflik (*the protection of children as the victims of that conflict*). Fokus perlindungan tersebut dititikberatkan pada perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut, meskipun tidak bisa dipisahkan, meliputi 2 (aspek) berikut:⁴⁹

- a. Anak yang terlibat sebagai kombatan (*children as participants*)
- b. Anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik (*children as victims*)⁵⁰

Ketentuan hukum mengenai perekrutan tentara anak dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) hanya terdapat dalam Pasal 38⁵¹ yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

Protokol Tambahan tahun 2000 (*Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child*). Pasal-pasal 1, 2, 3, 4 dan 6 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dan tidak merekrut secara wajib dalam suatu permusuhan dan dalam angkatan bersenjata. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.

Selain itu, anak sebagai bagian dari penduduk sipil yang menjadi korban konflik bersenjata harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak atas pendidikannya.

Hak anak untuk tetap menikmati hak atas pendidikan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa, bagaimanapun sulitnya keadaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan 29 KHA.

Pendidikan memiliki bagian penting dalam pencegahan dan pemulihan dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dalam situasi konflik dan pasca-konflik. Pendidikan juga melayani fungsi yang lebih luas. Pendidikan memberikan bentuk dan struktur untuk

⁴⁹ Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), *Memunculkan Anak sebagai Aktor Perdamaian: Upaya Memutus Siklus Konflik Secara Transformatif*, (Jakarta: 2007), hal. 15.

⁵⁰ Ben Majekodunmi, *Protection in Practice: The protection of children's rights in situations of armed conflict*, UNICEF Experience in Burundi, UNICEF Innocents Research Centre Florence, Italy, 1999, hal. 3

⁵¹ Lihat Pasal 38 KHA.

kehidupan anak-anak dan dapat menanamkan nilai-nilai masyarakat, mempromosikan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam meningkatkan perdamaian, stabilitas dan saling ketergantungan.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan hal yang utama yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 24 KHA bahwa pihak-pihak yang bersengketa menjamin hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan.

Anak-anak adalah yang paling rentan terhadap serangan kolektif pada kesehatan dan kesejahteraan dasar mereka, selain itu salah satu efek yang paling langsung dari konflik bersenjata adalah gangguan pasokan makanan yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang mengalami malnutrisi.⁵²

Pada Pasal 39 dari Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa :

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam atau hukuman yg kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.”

Ketentuan tersebut memastikan bahwa kesehatan dan gizi, kesejahteraan psikososial dan pendidikan merupakan prioritas komponen bantuan kemanusiaan adalah cara terbaik untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis anak-anak dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap anak yang berada dan menjadi korban dalam konflik bersenjata harus tetap mendapatkan perlindungan atas kesehatan, pendidikan serta perkembangan tubuh dan jiwanya.

Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:⁵³

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*)
- b. Hak untuk berkembang (*development rights*)
- c. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)
- d. Hak untuk Perlindungan (*protection rights*)

⁵² UNICEF, *The Impact of Armed Conflict on Child Development*, <http://www.un.org/rights/impact.htm>, (diakses 10 Januari 2012, pukul 22:13 wita).

⁵³ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 80-83.

Memang disadari, adanya KHA (dan instrumen internasional mengenai HAM lainnya) tidak serta merta bisa merubah situasi dan kondisi kehidupan anak-anak di dunia. Namun dengan adanya instrumen tersebut, yang menjadi standar minimal, setidaknya ada acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang lebih baik bagi anak-anak. KHA merupakan instrumen internasional yang telah memberikan dasar untuk bertindak. Jelas apa yang kurang adalah mekanisme dan kemauan untuk penegakan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrumen yang berisirumusan prinsip-prinsip universal HAM dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak. Terdapat empat prinsip umum yaitu: prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak, prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan atas pendapat anak. Ratifikasi universal atas konvensi tersebut merefleksikan komitmen global terhadap prinsip-prinsip hak-hak anak, dan perlindungannya. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana untuk sepenuhnya melaksanakan konvensi tersebut dan memberikan arahan bagi program penerapannya dalam lingkup nasional.
2. Kebutuhan dasar anak-anak harus dilindungi ketika konflik mengancam, dan perlindungan tersebut memerlukan pemenuhan atas hak-hak mereka melalui pelaksanaan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Fokus perlindungan tersebut dititikberatkan pada perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi Anak yang terlibat sebagai kombatan (*children as participants*) dan Anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik (*children as victims*). Konvensi ini merupakan perangkat hukum yang telah cukup memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal keterlibatan anak dalam angkatan bersenjata “tentara anak” serta dalam hal penegakan hak-hak anak dalam situasi konflik.

Saran

1. Pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting, sebab pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan memberikan rasa aman pada anak-anak dengan cara penyediaan lingkungan yang kondusif dalam hal ini pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka proses pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial.

2. Melindungi anak membutuhkan partisipasi lebih luas dan dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan persdalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Dalam rangka untuk menegakkan hukum hak asasi manusia, harus ada upaya dan tekad untuk menghukum pelanggar.
3. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupan harus dikerjakan bersama-sama, dan memerlukan suatu organisasi yang terkoordinasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Universitas Tri Sakti.
- Ahsinin, Adzkar. 2011. *Pekerjaan Terburuk Anak dalam Kerangka Hukum HAM Internasional*. Jakarta: Yayasan Pemantau Hak Anak.
- Boven, Theo Van. 1997. *The International System of Human Rights An Overview in Manual On Human Rights Reporting: Under Six Major International Human Rights Instruments*. OHCHR. UNITAR dan United Nation Staff College Project.
- Banning, Theo van. 2004. *Human Right Instruments*. Costa Rica: Mundo Grafic, University For Peace.
- Eddyono, Supriyadi W. 2005. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X. Materi: *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM.
- Gasser, Hans Peter. 1993. *International Red Cross and Red Crescent Movement*. Henry Dunant Institute Haupt. Vienna: Paupt Publisher Berne, Stuttgart.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harper, Erica. 2009. *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV Rajawali.
- _____.ed. Kushartoyo BS. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 1988 *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Jakarta: Bumi Nusantara Jaya.
- Harvey, Rachel. 2003. *Children and Armed Conflict: A Guide to International Humanitarian and Human Right Law*. IBCR: Montreal, Canada.

- IBCR. 2010. *Children and Armed Conflict: A Guide to International Humanitarian and Human Right Law. New Edition*. IBCR: Montreal, Canada.
- Ikhsan, Edy. 2002. *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan anak*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsinya dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumnus.
- Majekodunmi, Ben. 1999. *Protection in Practice: The protection of children's rights in situations of armed conflict. UNICEF Experience in Burundi. UNICEF Innocents Research Centre Florence. Italy*.
- Rusman, Rina. 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- UNICEF. 2009. *Machel Study 10-year Strategic Review: Children and Conflict in A Changing World*. New York : UNICEF.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wagiman, Wahyu. 2007. *Hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I*. Jakarta: ELSAM.
- Wright, Quincy. 1951. *A study of War*. Chicago: The University Chicago Press.

Jurnal dan Makalah

- Absori. *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*. Jurisprudence, Volume 2, No. 1. Maret 2005. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adwani. *Perlindungan Terhadap Orang-orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No. 1. Januari 2012.
- Doek, Jaap. *The International Legal Framework for the Protection of Children in Armed Conflict*. Disarmament Forum. 2011.

General Assembly United Nation. Promotion and Protection of the Rights of Children, Impact of Armed Conflict on Children. Fifty-first session. Item 108 of the provisional agenda. A/51/306 26 August 1996.

Hart, Jason and Bex Tyrer. *Research with Children Living in Situations of Armed Conflict: concepts, ethics and methods. RSC Working Paper No. 30. University of Oxford. 2006.*

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Psycho-social Assistance for Children Affected by Armed Conflict. Henry Dunant institute & international coordinating group of Cabac (children affected by armed conflict). 1211 Geneva 19, Switzerland. 1999,

Joni, Muhammad. Makalah, Hak-Hak Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2008.

Lorey, Mark. *Child Soldiers Care and Protection of Children in Emergencies A Field Guide, Save the Children Federation. Inc. 2001.*

Machel, Graça. *The Impact of Armed Conflict on Children: A critical review of progress made and obstacles encountered in increasing protection for war-affected children. Presented at the International Conference on War-Affected Children. September 2000. Winnipeg, Canada.*

Maher, Colleen C. *The Protection of Children in Armed Conflict: A Human Rights Analysis of the Protection Afforded to Children in Warfare. Volume 9 Issue 2 Article 5. Boston College Third World Law Journal. 1989.*

Puspita, Prawindya, *Tentara Anak dalam Konflik di Kong. Jurnal Dinamika HAM. Pusham Universitas Surabaya. 2009.*

Robinson, J A, *The Right of Child Victims of Armed Conflict to Reintegration and Recovery. Potchefstroomse Elektroniese Regsblad (PER). volume 15 No. 1. 2012.*

Shomaly, Jihad. *Used of the Children in Occupied Palestinian Territories. Perspektif Child Soldier. Defence for Children International/Palestine Section. 2004.*

Suardi. *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Ilmiah Santika Volume. 2 No. 3 Juli 2005.*

Sulaiman. Makalah, Sengketa Bersenjata Non Internasional dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Periode 1945-2000. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Terbuka. Gelanggang Mahasiswa, Kampus Universitas Sumatra Utara, 26 Mei 2005.

Tiefenbrun, Susan. *Child Soldiers, Slavery and the Trafficking of Childre. Fordham International Law Journal. Volume 31, Issue 2 Article 6. 2007.*

Triana, Nita. Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume 4 No. 2. Juli-Desember 2009. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.

Triplehorn, Carl. *Education Care and Protection of Children in Emergencies A Field Guide*. Save the Children Federation. 2001.

United Nations High Commissioner for Human Rights & International Bar Association. *Professional Training Series No. 9. Human Rights in the Administration of Justice: A manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers*. United Nation, New York & Geneva. 2003.

UNICEF. *Working paper N-1. The Six Grave Violation Against Children During Armed Conflict: the legal foundation*. Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. October 2009.

UNICEF. *Children Affected by Armed Conflict: UNICEF actions*. New York. 2002.

UNICEF. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York. 1998.

UNICEF. *Protecting Children During Armed Conflict. Child Protection Information Sheet*. New York. 2006.

UNICEF. *Will You Listen. Young Voices from Conflict Zones*. New York. October 2007.

Women Commission for Refugee Women and Children. *Right to Education During Displacement*. New York. Women Commission for Refugee Women and Children. 2006

YPHA. Kertas Posisi: Urgensi Pengembangan Pendidikan Damai Berbasis Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Memunculkan Anak sebagai Aktor Perdamaian: Upaya Memutus Siklus Konflik Secara Transformatif*. (Jakarta: 2007).

Yuliantiningsih, Aryuni. Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 8 No. 3. September 2008.

Situs Internet

<http://www.unicef.org/crc/crc.htm>.

<http://www.komnasham.go.id>.

<http://www2.ohchr.org/english/law>.

<http://magdalenasitorus.blogspot.com/2008/09/anak-dalam-situasi-konflik-bersenjata.html>.

<http://www.childrensrighswales.org.uk/uncrc-principles.aspx>

<http://www.unicef.org/graca>

<http://www.sekitarkita.com/More/2006/19/01.Htm>

<http://www.bkkbn.go.id/print.php/2006/1207.htm>

<http://syafiie.blogspot.com/2011/04/perlindungan-anak-dalam-hukum-humaniter.html>.

PERATURAN-PERATURAN

Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

Protokol Opsional Konvensi tentang Hak Anak 2000 mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948.



BIODATA

Nama : Citra Reskia
Nim : B111 09036
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11 No. 76 Makassar
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Alumni : 9233
Tgl Lulus : 21 Februari 2013
Fakultas : Hukum
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
IPK : 3.84
Prestasi Kelulusan : Cum Laude
Judul Skripsi : Penerapan Instrumen Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata

The background of the page features a large, faint watermark of the official logo of the University of Hasanudin. The logo is a shield-shaped emblem. At the top, it depicts a golden eagle with its wings spread, perched on a banner that reads 'UNIVERSITAS HASANUL DIN'. Below the eagle, the shield contains a white lotus flower on a green base. The entire shield is encircled by a green wreath of leaves. At the bottom of the shield, there is a small illustration of a traditional building or structure. The watermark is semi-transparent, allowing the text of the biodata to be clearly visible over it.

